

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Pratolo, 2009). Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Maryati, 2009). Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Hal ini juga menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah (Nugroho, 2010).

Tujuan otonomi daerah memang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Sumba Barat merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah khususnya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berlandaskan undang-undang nomor 1 tahun 2019 tentang pemerintah daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

kabupaten Sumba Barat masih belum transparansi. Artinya, program pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Sumba Barat belum efisiensi.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut (Halim, 2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh pada kemajuan daerah itu sendiri. Dalam hal ini, untuk melihat tingkat kinerja keuangan dalam Kabupaten Sumba Barat maka pemerintah daerah perlu memantau tingkat kinerja dalam pengelolaan alokasi belanja modal daerah. Pada kenyataannya yang di lihat saat ini, pemerintah daerah belum

mengalokasi dana belanja modal daerah dengan baik sehingga pengaruhnya dalam daerah belum begitu dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Suwandi dan Tahar (2015) pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening dengan hasil penelitian yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan fiskal memiliki pengaruh negatif pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD derajat tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal daerah tidak memiliki efek memediasi atas hubungan rasio derajat desentralisasi fiskal, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan tingkat kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun alokasi belanja modal dapat memediasi hubungan antara ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ayu, L.A dan Rahayu, S. Junaidin (2019) berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal. Selain itu, hanya variabel pertumbuhan PAD, efektivitas PAD, efisiensi keuangan dan alokasi belanja modal yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel alokasi belanja modal hanya memediasi secara parsial pengaruh variabel derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Sumba Barat.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sumba Barat.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini

1. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah.
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Peneliti.**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Di Kabupaten Sumba Barat.
- b. Untuk menguji pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Di Kabupaten Sumba Barat.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian.**

#### **a. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan dan pengembangan wawasan dan pengetahuan ekonomi, khususnya pemahaman tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening bagi mahasiswa ekonomi, dan sebuah bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Dan sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat.